

Pilkada Serentak: Potensi Pelanggaran Pilkada Serentak: Abuse of Power hingga Politik Uang

9 Juni 2020 - Ketua Bawaslu Abhan memaparkan potensi pelanggaran yang bisa terjadi pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, potensi pelanggaran ada pada calon petahana yang menggunakan kekuasaannya untuk menarik dukungan masyarakat.

Apalagi di tengah kondisi pandemi virus corona, pasti ada calon petahana yang memanfaatkan situasi ini untuk membagikan bansos saat kampanye.

"Potensi pelanggaran yang akan terjadi adalah abuse of power oleh petahana karena sulit bedakan antara bansos terkait COVID-19 dengan pelanggaran pemilihan," kata Abhan dalam diskusi virtual yang digagas Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Selasa (9/6).

Pelanggaran potensial lainnya adalah politik uang dan daftar pemilih yang tidak akurat. Untuk itu, Bawaslu akan melakukan pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.

"Pertama berlakukan protokol kesehatan secara ketat, mencegah potensi electoral malpractice, intervensi APBN dalam penyelenggaraan pemilihan pascapenundaan, koordinasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pemilihan, koordinasi intensif dengan pemerintah terkait," jelas Abhan.

"Berikutnya, pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan adalah kami sudah keluarkan surat edaran dalam kerangka melakukan pencegahan," lanjutnya lagi.

Tak hanya itu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan sejumlah stakeholders, dengan tujuan agar pelaksanaan tahapan Pilkada bisa berjalan lancar. Salah satunya terkait masa kampanye secara daring.

"Koordinasi dengan stakeholder penting karena untuk menjamin kampanye yang nantinya sebagian dilakukan dengan daring itu jadi kampanye beretika dan tidak jadi ajang kampanye ujaran kebencian atau SARA," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, pencoblosan Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Sementara tahapan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni (Sumber: kumparan.com)